BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan bisa diinterpretasikan sebagai usaha untuk mengeksekusi peningkatan pencapaian harta (*income per kapita*) secara berkesinambungan supaya negara mampu meningkatkan output lebih sigap daripada percepatan perkembangan kuantitas penduduk. Salah satu cara untuk mengukur kesuksesan kemajuan suatu negara adalah dengan melihat penurunan kuantitas penduduk miskin. Kemiskinan adalah permasalahan kondisi sosial ekonomi ditandai dengan kekurangan segi materi seperti uang, makanan, tempat tinggal layak, dan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan berlangsung sebab ketidaksamaan keterampilan penduduk sebagai pelaksana ekonomi dalam tahap perkembangan atau mengolah produk perkembangan.

Kemiskinan merupakan masalah klasik dan masih belum terselesaikan terutama di negara berkembang. Negara Indonesia sejak dulu hingga sekarang masih menghadapi permasalahan kemiskinan. Berbagai program, kebijakan dan perencanaan pembangunan akan dikerjakan untuk menyusutkan kuantitas masyarakat miskin. Peningkatan angka kemiskinan akan menyebabkan besarnya anggaran guna melangsungkan perkembangan ekonomi, maka dari itu secara konstan akan menghalang kemajuan ekonomi.

Indonesia menduduki peringkat ke-6 dengan angka kemiskinan tertinggi di Asia Tenggara sebesar 9,5% (Aditya, 2023). Tingkat kemiskinan Indonesia menunjukkan tren penurunan sejak September 2022. Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan kuantitas masyarakat miskin berkurang 460 ribu jiwa per Maret

2023. Menurut (Arsyad, 2010) kemiskinan di Indonesia berkeadaan multidimensional, terlihat dari beragam perspektif primer dan sekunder. Perspektif primer meliputi kekurangan aset, organisasi sosial-politik, dan pengetahuan serta keterampilan yang minim. Sementara itu, sekunder mencakup kekurangan jaringan sosial, sumber keuangan, dan informasi.

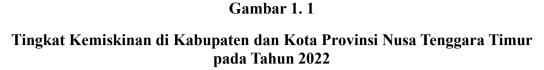
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2023, tidak semua provinsi di Indonesia mengalami penurunan persentase kemiskinan. Di bulan Juli 2023, kuantitas penduduk miskin di Indonesia menjangkau 25,90 juta jiwa dengan rata-rata garis kemiskinan penduduk Indonesia sebesar Rp 550.458 per kapita per bulan. Kemiskinan di Indonesia diakibatkan karna sejumlah komponen semacam pendidikan, akses sumber daya, pengelolaan keuangan, jumlah upah, infrastruktur, dan lain sebagainya. Kemiskinan sering terjadi pada daerah-daerah terpencil serta di kalangan penduduk pekerja pada sektor informal seperti pertanian dan jasa. Nusa Tenggara Timur termasuk salah satu provinsi dengan persentase kemiskinan terbesar ketiga pasca Papua dan Papua Barat. Persentase penduduk miskin di NTT saat ini sebesar 19,96% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 1.141.110 jiwa, serta garis kemiskinan per kapita sebesar Rp 507.203 per bulan (BPS, 2024).

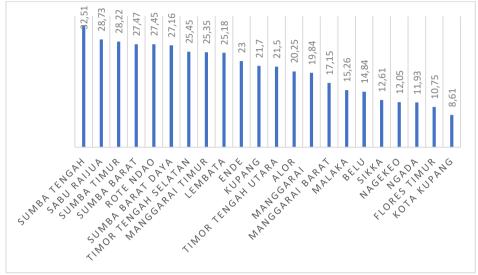
Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan dan kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Standar kemiskinan didasarkan pada terbatasnya pendapatan untuk membeli kebutuhan pokok, tingkat pendidikan rendah dan buruknya tingkat kesehatan. Kemiskinan merupakan masalah mengenai beberapa aspek karena berkaitan dengan pendapatan rendah serta buruknya lingkungan hidup sekitar. Kondisi kemiskinan terjadi berdasarkan ketidakberdayaan penduduk dalam memberantas permasalahan kemiskinan mereka

sendiri disebabkan oleh kurang optimalnya program pemerintah dalam menyerahkan pertolongan penanggulangan kemiskinan.

Menurut (Nurwati, 2008) kemiskinan adalah kendala sosial di dalam aktivitas masyarakat. Permasalahan kemiskinan terjadi dalam jangka tempo cukup panjang semacam umur manusia serta keterkaitan persoalan mampu mengaitkan beberapa sudut aktivitas manusia. Sehingga kemiskinan dapat diartikan dengan permasalahan sosial bersifat menyeluruh, sehingga permasalahan kemiskinan telah menggambarkan pandangan khusus serta hambatan tersebut terdapat di setiap daerah sekalipun akibat pada kemiskinan di tiap daerah sangatlah berbeda-beda.

Nusa Tenggara Timur adalah salah satu provinsi di bagian timur Indonesia dengan kawasan administratif yang terdiri dari 21 kabupaten dan 1 kota. Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi hasil pemecahan dari Provinsi Sunda Kecil bersama Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih menghadapi tantangan signifikan dalam hal pengentasan kemiskinan. Meskipun telah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pihak, persentase penduduk miskin di NTT masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata nasional. Hingga saat ini Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai tingkat kemiskinan sejumlah 20,05% di tahun 2022 (BPS, 2024). Keterbatasan terhadap air bersih, liatrik, jalan, dan fasilitas kesehatan menjadi kendala utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarkat. Sebagian besar masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian yang rentan terhadap perubahan iklim dan bencana alam.





Sumber: BPS, Data Diolah (2024)

Berdasarkan gambar 1.1 bisa disimpulkan bahwa angka kemiskinan pada kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih cukup tinggi dibandingkan dengan angka kemiskinan pada Kota Kupang hanya sebesar 8,61%. Disparitas antara kabupaten dan kota juga cukup signifikan, dengan beberapa wilayah kabupaten memiliki angka kemiskinan yang jauh lebih tinggi. Persentase penduduk miskin di kabupaten Provinsi Nusa Tenggara Timur masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata nasional walaupun terdapat upaaya pengentasan dari pemerintah dan berbagai pihak. Kabupaten Sumba Tengah merupakan kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi sebesar 32,51%. Kondisi geografis menjadi tantangan tingginya angka kemiskinan karena aksesibilitas ke wilayah tertentu di Sumba sangat terbatas, terutama di daerah pedalaman. Infrastruktur jalan yang buruk menyulitkan distribusi barang dan jasa, serta menghambat mobilitas penduduk setempat. Kondisi tanah yang kering dan kurang subur membuat pertanian menjadi sulit, yang merupakan mata pencaharian utama masyarakat

Sumba. Pada daerah Kabupaten Sumba rentan terhadap bencana alam seperti kekeringan yang dapat merusak hasil pertanian dan memperburuk kondisi ekonomi.

Selama beberapa tahun terakhir, di Nusa Tenggara Timur terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Namun, angka pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut masih terhitung rendah ketika dianalogikan dengan provinsi lain di Indonesia. Salah satu faktor pengaruh penurunan pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Timur adalah keterbatasan infrastruktur sehingga menghambat pertumbuhan sektor industri dan perdagangan serta kurangnya bahan bakar atau energi untuk memasak, fasilitas sanitasi, dan standar hidup pendapatan terbatas. Selain itu, kondisi alam gersang dan akses perjalanan rusak mengakibatkan kesulitan akses perjalanan sehingga pendidikan dan kesehatan juga mempengaruhi aspek kemiskinan.

Pembangunan ekonomi merupakan proses berkelanjutan dengan sasaran guna membangkitkan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) serta pendapatan per kapita masyarakat suatu negara dengan tempo yang lama sehingga berpengaruh terhadap beragam faktor ekonomi, sosial, sekalipun teknologi (Arsyad, 2010). Tujuan utama pembangunan ekonomi adalah memberikan kesempatan dan kemandirian dalam menutup kepentingan atas perlengkapan dan pencaharian serta menentukan kehidupannya guna memperoleh pendidikan yang dapat menyusutkan angka kemiskinan dan kesenjangan pemasukan penduduk (Murni, 2016). Tahapan pembangunan ekonomi dinantikan mampu mempengaruhi peningkatan ekonomi disertai peningkatan pendapatan nasional atau pendapatan per kapita penduduk.

Terdapat pembangunan ekonomi, akan berlangsung pertumbuhan ekonomi yaitu prosedur kenaikan penghasilan dan penggunaan barang serta jasa dalam aktivitas ekonomi penduduk. Suatu negara terbilang menghadapi peningkatan ekonomi apabila kuantitas komoditas barang serta jasa meningkat atau terdapat peningkatan *Gross National Product* (GNP) dalam negara. Keberhasilan peingkatan ekonomi berkaitan dengan upaya meningkatkan output dan produktivitas sehingga dapat memberikan kenaikan pendapatan per kapita dan kesejahteraan secara keseluruhan.

Pembangunan ekonomi daerah dinantikan memberi pengaruh positif kepada pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut, mengingat pembangunan ekonomi diukur dari perbandingan komponen untuk mewakili keadaan suatu daerah. Kebijakan pembangunan wilayah, mencakup keputusan dan intervensi pemerintah nasional dan regional diperlukan untuk mendorong proses pembangunan suatu daerah. Salah satu kebijakan utama dilakukan dalam usaha guna mengeksekusi sasaran pembangunan ekonomi daerah adalah berusaha semaksimal mungkin untuk menyeseuaikan prioritas pembangunan dengan potensi lokal. Keadaan ini berhubungan dengan potensi pembangunan di setiap daerah tentunya berbeda-beda, hingga tiap daerah patut menggariskan bidang ekonomi yang lebih utama memberikan dampak dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki dinamika yang unik, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi geografis, sumber daya alam, kebijakan pemerintah, dan globalisasi. Secara umum, pertumbuhan ekonomi di NTT mengalami fluktuasi, namun cenderung positif dalam beberapa tahun terakhir. Sektor pertanian, pariwisata, dan perikanan menjadi tulang punggung ekonomi NTT. Kinerja sektor-sektor ini sangat dipengaruhi oleh kondisi alam dan kebijakan pemerintah.

Gambar 1.1 Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2010-2022



Sumber: BPS, Data Diolah (2024)

Gambar 1.3, memperlihatkan pada tahun 2020, Nusa Tenggara Timur sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut. Menurut Badan Pusat Statistik (2023) pada tahun 2020, Nusa Tenggara Timur mengalami resesi ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi mencapai minus 0,84 persen (-0,84%). Resesi terjadi dikarenakan pada masa pandemi terdapat pembatasan kegiatan masyarakat, pembatasan waktu kerja, serta Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di berbagai perusahaan sehingga menghambat produksi barang dan jasa serta mengurangi pendapatan penduduk di Nusa Tenggara Timur. Kondisi geografis yang menantang, seperti wilayah pegunungan dan kepulauan, serta infrastruktur yang belum memadai, menjadi salah satu kendala utama. Sektor pertanian, pariwisata, dan perikanan menjadi tulang punggung ekonomi NTT, namun juga rentan terhadap perubahan iklim dan fluktuasi harga pasar. Meskipun demikian, NTT memiliki potensi pertumbuhan yang besar, terutama di sektor pariwisata. Upaya pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur, investasi, dan kualitas sumber daya manusia diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan

berkelanjutan. Tantangan ke depan adalah bagaimana mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan manusia, serta mengatasi masalah-masalah sosial seperti kemiskinan dan ketimpangan.

Seiring berjalannya waktu, Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi pasca pandemi. Pada gambar 1.1 menunjukkan adanya peningkatan di tahun 2021 sebesar 2,52% dan tahun 2022 sebesar 3,05%. Perkara kenaikan tersebut menandakan bahwa keadaan perekonomian di Nusa Tenggara Timur mampu meningkat dikarenakan adanya perkembangan aspek pertanian, kehutanan, dan perikanan serta beberapa komponen usaha berkembang seperti pengembangan listrik, gas dan jasa serta dialokasikan kondisi perekonomian pulih dan menghadapi kenaikan (Lestari et al., 2023). Peningkatan pertumbuhan ekonomi merujuk pada kenaikan tingkat produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian selama periode tertentu. Dengan potensi alam yang indah, budaya yang unik, dan berbagai destinasi wisata yang menarik, sektor pariwisata dapat menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi NTT.

Pengangguran menjadi salah satu target prioritas untuk diturunkan dengan tujuan pembagunan suatu daerah. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ialah kesetimpalan antara kuantitas pencari kerja dengan kuantitas angkatan kerja dan ditetapkan dalam satuan persen (%). Angkatan kerja ialah masyarakat berusia produktif (15 tahun ke atas) sedang berkerja atau mempunyai pekerjaan freelance. Permasalahan utama banyaknya tingkat pengangguran juga terjadi di tahun 2020, pengaruh dari adanya virus covid-19. Meningkatnya pengangguran disebabkan faktor beberapa industri atau perusahaan cenderung mengurangi produksi dan jumlah karyawan sehingga tingkat pengangguran semakin meningkat. Selain itu,

faktor pendidikan, keterampilan, dan lokasi geografis juga dapat mempengaruhi tingkat pengangguran suatu daerah atau wilayah.

Pengangguran merupakan salah satu permasalahan akibat dari peningkatan jumlah penduduk tiap tahun di suatu daerah. Pengangguran terjadi karena semakin banyak penduduk pencari pekerjaan, namun lowongan pekerjaan masih sangat. Jika tenaga kerja masih mencari pekerjaan dan tidak terserap ke dalam lapangan pekerjaan maka disebut dengan orang menganggur (Dharmayanti, 2011). Bertambahnya angka tingkat pengangguran, maka kian tidak bermanfaat aktivitas penduduk berdampak dengan ketidakmampuan mencukupi kepentingan hidupnya, jika kemakmuran masyarakat menurun, hal ini akan meningkatkan kemiskinan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ialah paramater dimanfaatkan guna menggambarkan kesejahteraan penduduk dalam suatu negarakesehatan, pendidikan, dan standar kehidupan layak. Angka harapan hidup, angka melek huruf, waktu sekolah rata-rata, dan pengeluaraan per kapita adalah metrik yang digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Posisi manusia selalu penting dalam setiap program kinerja pembangunan. Untuk mengukur keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan suatu negara atau wilayah dalam bidang pembangunan manusia, Program Pembangunan Internasional (UNDP) menetapkan HDI sebagai indikator. Fransiskus (2019) menyatakan bahwa berdasarkan komponen pembangunan, komponen di provinsi Nusa Tenggara Timur terbilang sedikit tertinggal serta terdapat ketidaksetaraan pendapatan perkapita daripada provinsi lain.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Nusa Tenggara Timur (NTT) secara umum masih berada di bawah rata-rata nasional. Kondisi geografis yang

menantang, infrastruktur yang kurang memadai, serta tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan menjadi faktor utama penyebabnya. Meskipun demikian, terdapat perbedaan yang signifikan antara IPM di masing-masing kabupaten/kota di NTT. Beberapa daerah telah menunjukkan kemajuan yang cukup baik, namun masih banyak daerah yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Untuk meningkatkan IPM di NTT, perlu dilakukan berbagai upaya seperti meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, mengembangkan infrastruktur, serta memberdayakan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan kualitas hidup masyarakat NTT dapat terus meningkat.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut , maka penulis ingin melaksanakan penelitian dengan menggunakan judul "Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Empat Kabupaten Sumba Tengah, Sabu Raijua, Sumba Timur, dan Sumba Barat"

1.2 Rumusan Masalah

Menurut penjelasan latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan pokok masalah penelitian sebagai berikut :

- 1. Apakah tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumba Tengah, Sabu Raijua, Sumba Timur, dan Sumba Barat?
- 2. Apakah Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumba Tengah, Sabu Raijua, Sumba Timur, dan Sumba Barat?

3. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumba Tengah, Sabu Raijua, Sumba Timur, dan Sumba Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka diperoleh beberapa tujuan penelitian, diantaranya:

- Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumba Tengah, Sabu Raijua, Sumba Timur, dan Sumba Barat.
- Untuk mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumba Tengah, Sabu Raijua, Sumba Timur, dan Sumba Barat.
- Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumba Tengah, Sabu Raijua, Sumba Timur, dan Sumba Barat.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Analisis kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Data sekunder diperoleh dari sumber eksternal—situs web Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk melakukan perhitungan, penelitian ini melibatkan empat kabupaten di Sumba Tengah, Sabu Raijua, Sumba Timur, dan Sumba Barat dari tahun 2013 hingga 2022. Data yang digunakan terdiri dari rangkaian waktu dan bagian-bagian.

Studi ini bertujuan untuk melihat bagaimana tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur berdampak. Dalam penelitian ini, tingkat kemiskinan digunakan sebagai variabel dependen, dan tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, dan pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai variabel independen..

1.5 Manfaat Penelitian

Diharapkan dalam penelitian ini dapat membagikan manfaat antara lain:

- 1. Bagi peneliti, hasil dari penelitian ini mampu menambah pengetahuan terkait penelitan pengaruh tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan serta merupakan tugas akhir untuk menyelesaikan studi S1 Ekonomi Pembangunan.
- 2. Bagi akademisi, penelitian ini dinantikan bisa membentuk bahan literatur guna melakukan penelitian dikemudian hari terkait permasalahan serupa serta sebagai perbandingan penelitian di masa depan.